

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU/LITERATUR

- Adnan Buyung Nasution, *Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benih Reformasi (Jakarta: Otopografi, Aksara Karunia ,2004 dan Kajian Terhadap Kebijakan MP3EI, Prakarsa, Jakarta, 2014.*
- Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Ginanjart Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, Jakarta: Bappenas, 1996.
- Husen Alting, “*Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*”, Yogyakarta, 2010. Kompas, Jakarta 2001.
- Hasin Thohari., *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga.2016.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif* (Jakarta: Aksara Baru, Jakarta, 1983).
- Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *konstitusi & konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Jose Figueres, *Beberapa Dasar Ekonomi pada Hak-Hak Asasi Manusia*, Dokumen PBB (UN Doc.A/CONF.32/L.2), 1968. Sebagaimana disadur dalam Ian Brownije, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai HAM : Edisi Kedua*, UI Press, Jakarta, 1993.
- Laporan Penelitian BAPPENAS RI, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. 2017.
- Maria S.W Sumardjono, “*Kebijakan Pertanahan, antara Regulasi dan Implementasi*”, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2001.
- Mayer, Robert R, 1985, *Policy and Program Planning, A Developmental Perspective*, Prentice-Hall Inc, New Jersey.

- Moh.Mahfud MD., *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara* (Yogyakarta: UII Press,1999).
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015).
- Sondang P Siagian. *Administrasi Pembangunan, Gunung Agung*, Cetakan 10, Jakarta. 1983.
- Syaifullah. *Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota Magelang*. Tesis. Eprint Undip. 2011.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, cetakan ke-18 tahun 1985, Toko Gunung Agung, Jakarta. 1996.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis KonsepArah dan Strategi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1987.
- Tri Widodo, *Perencanaan Pembangunan*, UPP, Yogyakarta, 2006, Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Wijayanti, Septi Nur dan Iwan Satriawan, “*Hukum Tata Negara Teori dan Prakteknya Di Indonesia*”.Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta. 2009.
- Wiko Saputra, *Pembangunan Ekonomi dan Terancamnya Hak Dasar Masyarakat : Kritik*.

#### **JURNAL HUKUM :**

- Ahmad Redi, Yuwono Prianto, Tundjung Herning Sitabuana, Ade Adhari, “Konstitusional Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hak Ulayat Rumpon Di Provinsi Lampung”, *Jurnal Konstitusi* Vol.14, Nomor 3, (September 2017)
- Amrina Rosyada, Esmi Warassih, Ratna Herawati, “Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial”, *Jurnal Kanun* Vol. 20 Nomor 1, (April 2018)
- Ananda Prima Yurista, “Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.13, Nomor 2, (Juni 2016)
- Budhi Setianingsih, Endang Setyowati, Siswidyanto, “Evektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENDAs)” *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 3 Nomor 11, (Juli, 2015)

- Drajat dan Hanif, "Konsep dan Teori Pembangunan", *Jurnal FIS Unair* Vol 1, hlm.5, (April, 2017)
- Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya", *Jurnal Pandecta UNNES* Vol 10. Nomor 1, (Juni, 2015)
- Jawahir Thontowi, "Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Ius Quia Iustum* Vol 1 Nomor 20 (Januari 2013)
- Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan", *Jurnal DPR RI* Vol 6, (September 2015)
- Mochamad Adib Zain dan Ahmad Siddiq, "Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Penelitian Hukum UGM* Vol 2 Nomor 2, (Juli 2015)
- Yahya Ahmad Zein dan Dewi Durvianti, "Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia", *Jurnal Veritas et Justitia Universitas Katolik Parahyangan* Vol. 3 No. 2, (Desember 2017)

#### **INTERNET :**

- Fahmi Agus Wibowo. *Konsep Dasar Perencanaan*. Fahmiagus@blogspot.com..Diakses tanggal 5-02-2019, pukul 23:52 WIB
- <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-5.pdf>, diakses pada 13 maret 2019, pada pukul 00:49 WIB
- Nandang Alamsah Deliarnoor, "Arti dan Pentingnya Mengetahui dan Memahami Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Hukum Tata Negara Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dalam Hubungannya dengan Praktek Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat", [http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2011/01/arti\\_dan\\_pentingnya\\_mengetahui\\_dan\\_memahami\\_hukum\\_tata\\_negara\\_RI.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2011/01/arti_dan_pentingnya_mengetahui_dan_memahami_hukum_tata_negara_RI.pdf), diakses pada 11 November 2018.
- <https://walhi.or.id/category/jurnal-walhi/> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB
- [https://www.bappenas.go.id/files/7014/2889/4255/Masyarakat\\_Adat\\_di\\_Indonesia\\_Menuju\\_Perlindungan\\_Sosial\\_yang\\_Inklusif.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/7014/2889/4255/Masyarakat_Adat_di_Indonesia_Menuju_Perlindungan_Sosial_yang_Inklusif.pdf), diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

<http://www.aman.or.id/masyarakat-adat-murung-raja-menatap-pengakuan-dan-perlindungan-hukum/> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

<https://tirto.id/pembahasan-ruu-masyarakat-adat-mandek-hak-warga-terabaikan-de5s> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

<http://brwa.or.id/news/read/346> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

[https://nasional.kompas.com/read/2019/04/05/07023961/temuan-komnas\\_hakmasyarakat-adat-belum-rekam-e-ktp-hingga-sosialisasi-bagi?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2019/04/05/07023961/temuan-komnas_hakmasyarakat-adat-belum-rekam-e-ktp-hingga-sosialisasi-bagi?page=all) diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

<https://tirto.id/kemendagri-sebut-masyarakat-adat-masih-banyak-yang-stateless-de3J> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

<https://walhi.or.id/category/jurnal-walhi/> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190117042203-12-361437/ribuan-orang-masyarakat-adat-jadi-korban-konflik-agraria> diakses pada 10 juli 2019, pukul 21:00 WIB

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa